

RAPAT DENGAR PENDAPAT



PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI

Oleh:
DIREKTUR JENDERAL PSP

Senin, 5 April 2021





I. REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

per tanggal 31 Desember 2020

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI SETAHUN	REALISASI	
			Volume (Ton)	(%)
1	UREA	4.025.467	3.971.397	98,66
2	SP-36	600.000	591.196	98,53
3	ZA	850.000	819.549	96,42
4	NPK	2.688.000	2.681.266	99,75
5	NPK Formula Khusus	17.000	8.982	52,84
5	ORGANIK	720.000	648.450	90,06
JUMLAH		8.900.467	8.720.839	97,98

per tanggal 30 Maret 2021

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI SETAHUN	REALISASI	
			Volume (Ton)	(%)
1	UREA	4.166.669	885.428	21,25
2	SP-36	640.812	75.973	11,86
3	ZA	784.144	159.535	20,35
4	NPK	2.662.000	648.118	24,35
5	NPK Formula Khusus	17.000	1.696	9,97
6	ORGANIK Granul	770.850	132.360	17,17
7	ORGANIK CAIR	1.500.000	-	-
JUMLAH		9.041.475	1.903.110	21,05



II. REALISASI KEUANGAN SUBSIDI PUPUK

per tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	ALOKASI DIPA (Rp)	REALISASI *) (Rp)	%
UREA	10.612.785.484.000	10.206.572.838.293	96,17
SP36	1.488.943.000.000	1.377.483.007.514	92,51
ZA	1.235.938.500.000	1.051.287.646.010	85,06
NPK			
a. NPK	10.531.304.448.000	10.223.794.797.930	97,08
b. NPK FORMULA KHUSUS	72.712.383.000	32.291.870.395	44,41
ORGANIK	983.475.360.000	793.175.048.801	80,65
	24.925.159.175.000	23.684.605.208.943	95,02
DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL			
UREA	2.642.329.791.000	2.642.323.010.144	100,00
SP36	315.000.000.000	314.998.116.717	100,00
ZA	179.889.200.000	179.888.076.000	100,00
	3.137.218.991.000	3.137.209.202.861	100,00
JUMLAH SUBSIDI PUPUK TA 2020	28.062.378.166.000	26.821.814.411.804	95,58
KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TA 2017	45.080.940.000	45.080.940.000	100,00
KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TA 2018	5.712.863.663.000	5.712.863.663.000	100,00
KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TA 2019	206.520.317.000	206.520.317.000	100,00
KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TA 2019 TAHAP II	1.450.621.183.000	1.450.621.183.000	100,00
JUMLAH	35.477.464.269.000	34.236.900.514.804	96,50



III. REALISASI IMPLEMENTASI KARTU TANI

Per 28 Februari 2021

No	Bank Pelaksana	Jumlah Petani (data e-RDKK)	JUMLAH KIOS	Kios Terpasang EDC		Kartu Tani Tercetak		Kartu Tani Terdistribusi		Kartu Tani Terinject Kuota		Kartu Tani sudah Digunakan	
				Unit	%	Kartu	%	Kartu	%	Kartu	%	transaksi	%
1	BNI	7.854.320	14.175	12.296	86,74	6.764.859	86,13	2.427.592	30,91	2.177.219	27,72	212.731	2,71
2	BRI	5.920.410	8.024	7.202	89,76	4.261.762	71,98	3.560.679	60,14	4.246.081	71,72	501.561	8,47
3	MANDIRI	2.844.983	4.947	4.130	83,48	1.749.866	61,51	1.268.801	44,60	1.419.180	49,88	121.486	4,27
JUMLAH		16.619.713	27.146	23.628	87,04	12.776.487	71,98	7.257.072	43,67	7.842.480	47,19	835.778	0,05



IV. REALISASI PENYELESEIAN KURANG BAYAR

NO	KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK	NILAI	REALISASI			SISA
			APBN 2019	APBN 2020	JUMLAH	
1	TA 2017	1.833.249.604.468	1.788.168.665.197	45.080.939.271	1.833.249.604.468	-
2	TA 2018	5.712.863.662.940	-	5.712.863.662.940	5.712.863.662.940	-
3	TA 2019	5.440.607.567.715	-	1.657.141.500.000	1.657.141.500.000	3.783.466.067.715
	TOTAL	12.986.720.835.123	1.788.168.665.197	7.415.086.102.211	9.203.254.767.408	3.783.466.067.715

*Penyelesaian kurang bayar TA 2019 sebesar Rp3,78 Trilyun dalam proses pengajuan ke DJA Kemenkeu

V. DAMPAK PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI



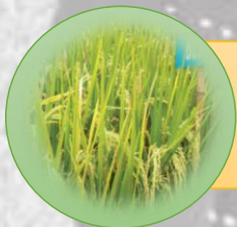
Penerima manfaat langsung adalah petani kecil dengan luas garapan 2 ha;



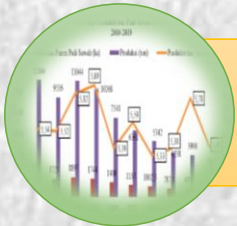
Sasaran penerima subsidi pupuk (TA 2021) : 16,6 juta petani berbasis NIK, mencakup 32 juta ha luas tanam (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)



Dengan alokasi subsidi sebesar Rp25,276 T; Rata-rata alokasi subsidi sebesar Rp1,52 juta/petani/tahun atau Rp766.000/ha/tahun;



Subsidi harga pupuk mendorong penggunaan pupuk untuk mengoptimalkan potensi genetik produktivitas varietas unggul;



Pada daerah yang produktivitasnya sudah tinggi, subsidi pupuk berperan mempertahankan produktivitas agar tidak turun.

RETURN KEBIJAKAN PUPUK SUBSIDI SECARA NASIONAL

(Nilai komersial produksi tanaman pangan)

Data Kementerian Pertanian pada 2020 (Rakernas)

Komoditas	Produksi nasional (juta ton)	Harga (Rp/kg)
Padi	55,2	5.250
Jagung	24,2	3.150
Kedelai	0,32	8.200

Dari total 9 juta ton, sekitar 6,1 juta ton pupuk untuk PAJALE, sekitar 2.8 juta ton untuk perkebunan, 0.2 juta ton/ha untuk hortikultura, dll



Rp 104,2 Trilyun
(output kinerja berbagai sarana produksi)



Kontribusi pupuk terhadap peningkatan produksi Pajale (data Balitbangtan):

Padi : 23,6%, jagung 46,2%, dan kedelai 24,5%

➔ Nilai indikatif *return* subsidi pupuk **Rp 50,98 T (257%)** ➔ subsidi pupuk Tan Pangan (Rp 20,04 T).



Nilai tersebut belum memperhitungkan return pupuk subsidi dari komoditas Tan. Pangan lainnya (kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) ➔ Kebijakan subsidi pupuk mempunyai dampak ekonomi yang tinggi dan positif terhadap sub-sektor tanaman pangan.

VI. KENDALA PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI

Kendala

Keterbatasan Anggaran

Kapasitas petugas pendamping petani terbatas jumlah dan kualitasnya

Sarana pendukung system pendataan dan pengawalan penyaluran pupuk kurang memadai

Melibatkan berbagai instansi terkait (Kemenkeu, Kemendag, Kemen Industri, Kemendagri, Kemen BUMN)

Rawan Penyimpangan

Alternatif Solusi

Memanfaatkan fasilitasi KUR, Dana Desa, bantuan APBD I, APBD II untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBN sesuai peraturan perundangan

Penambahan personal penyuluh pertanian

Peningkatan infrastruktur pendukung pada Kostratani Kecamatan sebagai satuan terkecil

Peningkatan Kerjasama melalui MoU/Surat Keputusan Bersama

Akselerasi digitaslisasi (system eRDKK, Kartu Tani dan system eVerval) yang mudah diakses untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik

KENDALA IMPLEMENTASI KARTU TANI

- Sistem antar Bank HIMBARA tidak sama
- Prosedur Penerbitan dan inject kuota Kartu Tani antar Bank berbeda
- Sesuai SOP Perbankan, proses pendistribusian harus face to face, di masa pandemi terhambat
- Sarana IT (signal internet) belum mampu menjamin bekerjanya transaksi melalui EDC
- Banyak petani tidak terbiasa dan enggan berhubungan dengan proses perbankan.
- Kapasitas SDM kios, banyak yang belum menguasai teknologi EDC
- Transaksi harus dilakukan satu per satu, pada setiap jenis pupuk.
- Petani lupa PIN atau tidak dapat bertransaksi dengan Kartu Tani, kartu hilang, kartu tidak aktif



VII. PERBAIKAN TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI

Perbaikan Tata Kelola yang sudah dilakukan

- Penyempurnaan system eRDKK (Sinkronisasi data Dukcapil, Filterisasi usulan lahan >2Ha dan doble NIK, rasionalisasi dosis per Kecamatan, pembatasan waktu entry (T-1))
- Efisiensi HPP : Revisi Permentan 01 Tahun 2012 menjadi Permentan 28 Tahun 2020 tentang Komponen HPP
- Merubah formula NPK 15:15:15 menjadi !5:10:12
- Menaikan HET Rp300-450 per Kg
- Validasi penyaluran melalui percepatan implementasi Kartu Tani dan system eVerval

Rencana Perbaikan :

- Selektifitas petani prioritas penerima subsidi
- Penambahan personal penyuluh pertanian dan kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan
- Pengembangan system pengawasan penyaluran secara spatial
- Peningkatan Kerjasama melalui MoU dengan Kemendagri untuk melibatkan unsur Camat dalam pengawasan

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR PERTANIAN 2021

*Berdasarkan data eRDKK 2021 per tanggal 28 November 2020

**Kebutuhan Pupuk Bersubsidi :
23,2 juta ton**

Tanaman Pangan (3 Musim Tanam)

Rencana Tanam : 24,86 juta Ha
Kebutuhan Pupuk : 16,00 juta ton

Hortikultura

Rencana Tanam : 2,06 juta Ha
Kebutuhan Pupuk : 2,57 juta ton

Perkebunan

Rencana Tanam : 5,39 juta Ha
Kebutuhan Pupuk : 5,40 juta ton

Peternakan

Rencana Tanam : 37,90 ribu Ha
Kebutuhan Pupuk : 18,66 ribu ton

Perikanan

Rencana Tanam : 136,72 ribu Ha
Kebutuhan Pupuk : 132,04 ribu ton

Subsektor	Rencana Tanam (Ha)	Data eRDKK				
		Total Urea (Ton)	Total SP-36 (Ton)	Total ZA (Ton)	Total NPK (Ton)	Total Organik (Ton)
Tanaman Pangan	24.859.574,61	3.896.849	113.422	1.004.882	6.327.618	4.659.013
Hortikultura	2.060.392,49	421.028	345.471	342.192	648.884	811.394
Perkebunan	5.395.202,46	1.034.854	667.115	608.026	1.228.916	1.022.183
Peternakan	37.897,27	7.608	1.112	1.190	2.668	6.086
Perikanan	136.719,50	50.920	37.993	4.070	16.044	23.014
Total	32.489.786,32	5.411.259	1.165.112	1.960.360	8.224.131	6.521.690

**Kebutuhan Anggaran sekitar Rp63,03 Trilyun,
Pagu Indikatif : Rp25,27 Trilyun**

LANGKAH STRATEGIS OPTIMASI ANGGARAN SUBSIDI PUPUK TA 2021

1

Penurunan HPP sekitar 5% terdapat efisiensi Rp2,457 Trilyun

Rekomendasi KPK,BPK,BKPP dan ITJEN Kementerian Keuangan (Merevisi Permentan 01 Tahun 2012 menjadi Permentan 28 Tahun 2020 tentang Komponen HPP)

2

Perubahan formula NPK 15:15:15 menjadi NPK 15:10:12 terdapat efisiensi sebesar Rp2,272 Trilyun

Hasil kajian Badan Litbang Pertanian (Status hara P dan K lahan sawah sedang-tinggi) dan Kesepakatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pupuk dengan Koordinator Kemenko Perekonomian

3

Kenaikan HET Rp300-450/Kg terdapat efisiensi Rp2,578 Trilyun

Urea naik Rp450/Kg; SP-36 naik Rp400/Kg; serta ZA dan Organik naik Rp300/Kg

PERTIMBANGAN KENAIKAN HET PUPUK BERSUBSIDI 2021

1. ANGGARAN SUBSIDI TURUN

- TA 2020 : Rp 29,7 Trilyun, 8,9 juta Ton
- TA 2021 : Rp25,28 Trilyun, 8,2 juta Ton

2. USULAN PETANI

surat KTNA kepada Menteri Keuangan No 07/E/KTNA-Nas/03/2020 tanggal 20/3/2020, kesediaan petani kenaikan HET sekitar Rp300-500/kg untuk mengatasi kekurangan pupuk

3. KESIMPULAN RDP DPR

12 Februari 2020 : Kenaikan HET diperlukan untuk menabuh volume agar kebutuhan petani terpenuhi

4. HET TETAP SEJAK 2012

Tidak ada kenaikan HET sejak Tahun 2012 sementara kenaikan HPP Gabah hampir setiap tahun meningkat

5. MEMINIMALKAN GAP HARGA

Meminimalkan kesenjangan harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi untuk meminimalkan penyimpangan

6. REKOMENDASI KEMENKEU

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2020, agar meninjau ulang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan efisiensi HPP

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2020-2021

Keterangan	2020			2021		
	E-RDKK	ALOKASI	%	E-RDKK	ALOKASI	%
Pagu Indikatif (Rp.Trilyun)	69,224	29,764	42,99	67,128	25,276	37,65
Jumlah Petani	13.948.878			16.619.713		
Total Luas Tanam (ha)	27.176.263,24			32.489.786,32		
Pupuk Urea (Ton)	5.929.880	4.025.467	67,88	5.411.259	4.166.669	77
Pupuk Sp36 (Ton)	2.845.557	600.000	21,09	1.165.112	640.812	55
Pupuk Za (Ton)	2.367.068	850.000	35,91	1.960.360	784.144	40
Pupuk NPK (Ton)	7.185.710	2.688.000	37,41	8.224.131	2.662.000	32,37
NPK Formula Khusus (Ton)		17.000			17.000	
Pupuk Organik (Ton)	7.837.205	720.000	9,19	6.521.690	770.850	11,82
Pupuk Organik Cair (Liter)					1.500.000	
TOTAL	26.165.419	8.900.467	34,02	23.282.551	9.041.475	45,28

*Berdasarkan data eRDKK 2021 : jumlah petani : **16,6 juta petani**, kebutuhan pupuk :**23,2 juta ton** senilai **Rp67,12 Trilyun** sehingga kekurangan anggaran subsidi sebesar **Rp41,905 Trilyun**

ISU KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI

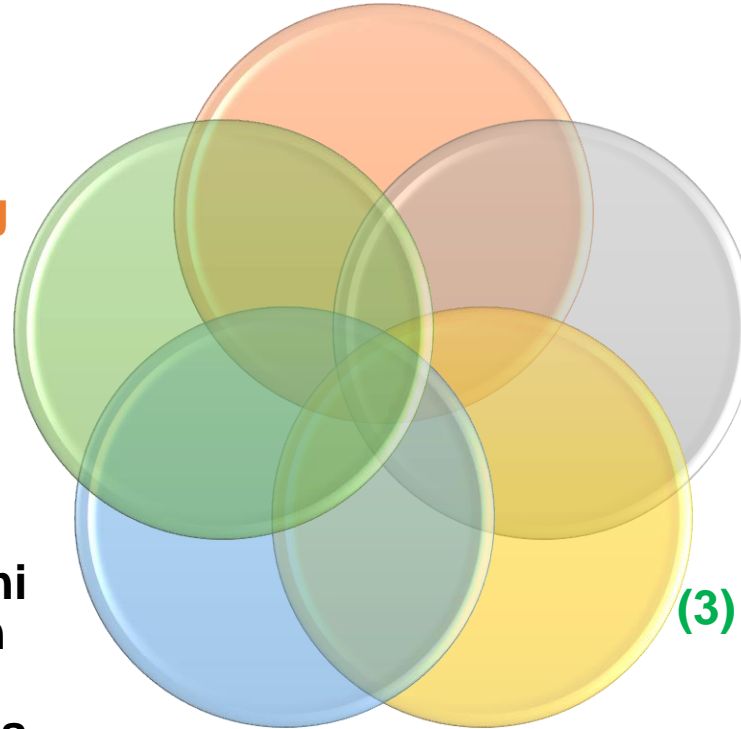
(1) Ketersediaan Pupuk Bersubsidi hanya Sekitar 45% dari Kebutuhan

(5) Luas Lahan Kecil dan kemasan pupuk bersubsidi (50kg) mendorong Penggunaan Pupuk Per Ha Berlebih

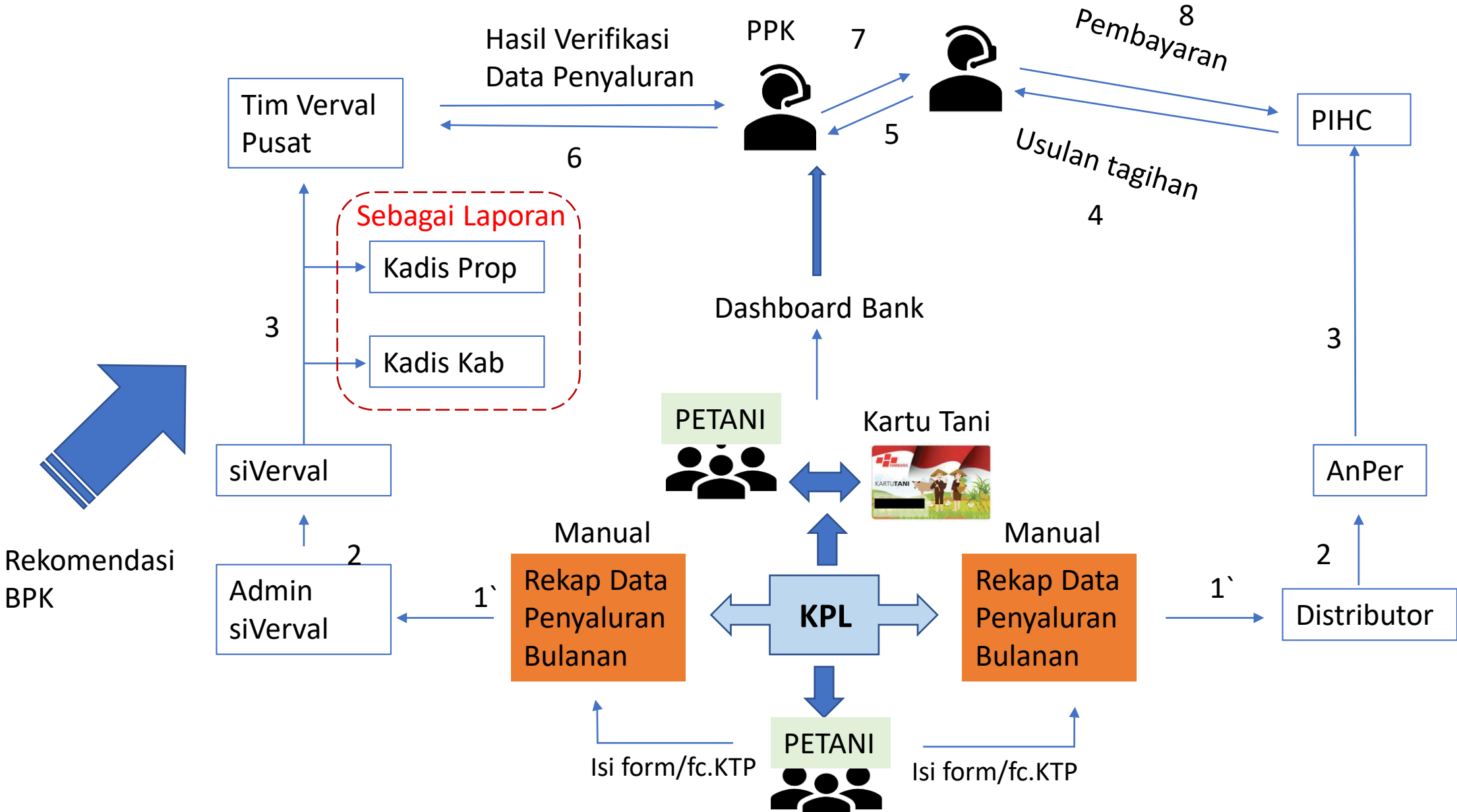
(4) Perilaku Petani Menggunakan Pupuk Urea Berlebih “Puas Melihat Daun Padi Hijau”

(2) Tingginya Disparitas Harga Antara Pupuk Bersubsidi dan Nonsubsidi memicu Perembesan Pupuk Bersubsidi Ke Pasar Non Subsidi

(3) Penyediaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal tanam



MEKANISME VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI



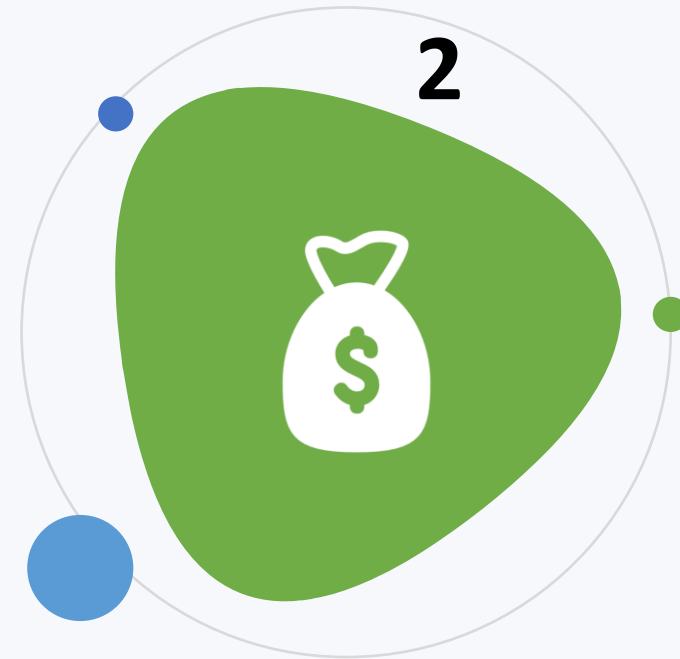


VIII. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN SKEMA SUBSIDI PUPUK

*Kesepakatan Rapat Tanggal 29 Januari 2021



Subsidi Langsung Pupuk



Subsidi Input/Harga



1. SUBSIDI LANGSUNG PUPUK

Prasyarat	Pro (+)	Kontra (-)
<ul style="list-style-type: none">• Database petani penerima harus tersedia dan akurat (<i>by name by address by luas lahan</i>).• Kriteria petani penerima manfaat (luas, pola tanam/komoditas) lebih selektif• KARTU/Norek petani penerima harus sudah tersedia dan diterima pada t-1.• Adanya kepastian sistem pasokan, penyediaan (termasuk <i>remote area</i>), dan kualitas pupuk yang disediakan.• Kelompok Tani (POKTAN) sebagai jalur pembagian KARTU harus kuat dan solid.• Adanya pengawasan terhadap aparat pelaksana, kios pengecer, petani untuk memastikan realisasi penebusan pupuk	<ul style="list-style-type: none">• Subsidi diterima langsung oleh petani;• Harga input pertanian menjadi lebih bersaing, terutama di daerah yang mudah dicapai/infrastruktur lancar.• Penggunaan saprodi menjadi lebih optimal.• Mendorong diversifikasi usaha bagi petani (menyesuaikan biaya input produksi).	<ul style="list-style-type: none">• Harga pupuk berpotensi naik, fluktuatif, dan berbeda antar wilayah sesuai kondisi infrastruktur dan sarana logistik.• Apabila terdapat <i>time-lag</i> antara waktu pemupukan dan penerimaan KARTU/Subsidi, maka petani memerlukan pembayaran tunai lebih besar dari kemampuan.• Jaminan ketersediaan pupuk di semua wilayah menjadi rentan (terutama daerah <i>remote</i>).• Dapat menyebabkan munculnya keresahan karena pemilihan petani lebih selektif



2. SUBSIDI INPUT/HARGA

Prasyarat	Pro (+)	Kontra (-)
<ul style="list-style-type: none">• Database petani penerima harus tersedia dan akurat (<i>by name by address by luas lahan</i>)• Selama masih menggunakan sistem tertutup melalui RDKK, maka perlu optimalisasi penyuluh dan peningkatan peran POKTAN dalam penyusunan RDKK yang akurat dan tepat waktu, serta admin untuk proses entry system eRDKK• Meningkatkan peran Pemerintah Daerah (termasuk KPPP), dalam melakukan perencanaan kebutuhan (termasuk optimalisasi penyuluh dalam pendampingan penyusunan RDKK) serta pengawasan pengadaan	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung kedaulatan pangan karena skema subsidi berupa subsidi harga dapat meminimalisasi disparitas harga pasar pupuk bersubsidi (melalui penetapan HET), sehingga mampu dibeli petani• Penyediaan pupuk bersubsidi lebih terjamin, termasuk di daerah remote.• Adanya jaminan kualitas pupuk, karena standar	<ul style="list-style-type: none">• Petani tidak merasakan subsidi secara langsung, sehingga berpotensi boros dalam penggunaannya.• Selama pengawasan Pemda dan KPPP belum optimal, masih akan terjadi penyimpangan subsidi seperti harga di atas HET dan penggunaan pupuk untuk tujuan lain.• Disparitas harga pupuk bersubsidi dan non sub, yang tinggi dapat mendorong penyelewengan pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak disubsidi.



Mentori SYL
Syahrul Yasim Limpo

“

“Kali ini, Kita distribusikan pupuk dengan NIK, by name by address. Dan ini penting untuk dilakukan agar kebutuhan semua warga negara terpenuhi.

Kebutuhan pupuk by name by address kemudian diajukan dalam eRDKK dan kita lakukan validasi yang panjang dan bertahap. Dan itulah yang membuat kita mendapatkan 94% data valid untuk penerima pupuk bersubsidi”

”



PSPKementan



Contoh : KENDALA IMPLEMENTASI KARTU TANI

1. Sistem antar Bank HIMBARA tidak sama
2. Prosedur Penerbitan dan inject kuota Kartu Tani antar Bank berbeda
3. Sesuai SOP Perbankan, proses pendistribusian harus face to face, di masa pandemi terhambat
4. Sarana IT (signal internet) belum mampu menjamin bekerjanya transaksi melalui EDC
5. Banyak petani tidak terbiasa dan enggan berhubungan dengan proses perbankan.
6. Kapasitas SDM kios, banyak yang belum menguasai teknologi EDC
7. Transaksi harus dilakukan satu per satu, pada setiap jenis pupuk.
8. Petani lupa PIN atau tidak dapat bertransaksi dengan Kartu Tani, kartu hilang, kartu tidak aktif



Contoh

1. BRI ; sinkronisasi data eRDKK dengan sistem SINPI (memerlukan waktu untuk sinkronisasi), kodefikasi data desa harus disamakan
2. BNI : inject kuota satu persatu per jenis pupuk
3. Sebelum Pandemi Bank bekerja sama dg BPP mengumpulkan petani di BPP untuk membagikan kartu
4. provider chip mesin EDC berbeda antar wilayah, sehingga proses transaksi terhambat bila provider tidak tepat, pada saat transaksi seringkali harus berkali-kali gesek
5. Penggunaan kartu tani dianggap petani harus berurusan dengan Bank, harus tersedia saldo, harus paham administrasi perbankan
6. Pemilik/pengelola kios yang sudah cukup usia sulit mengoperasikan mesin EDC
7. Transaksi pupuk oleh petani harus diproses oleh kios satu per satu